

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Partisipasi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam Berpolitik

Partisipasi perempuan PKS Kota Medan diawali adanya kontribusi perempuan tersebut. Kontribusi perempuan dimulai dengan perekrutan perempuan. Sebagaimana partai politik lainnya, kader PKS terdiri dari laki-laki dan perempuan. Tahap awal untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di posisi parlemen adalah dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik dalam artian meningkatkan kuantitas kader perempuan dalam partai tersebut. Sebagai salah satu fungsi partai politik yang telah disebutkan sebelumnya adalah sarana rekrutmen politik. Partai politik melakukan perekrutan terhadap masyarakat untuk menjadi kader-kader partai.

Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam melakukan perekrutan bukan hanya dilakukan oleh bidang kaderisasi, namun perekrutan anggota dilakukan dengan melibatkan bidang-bidang sesuai dengan program-program bidang tersebut. Misalnya, bidang kepemudaan akan membuat program dalam segmen kepemudaan, bidang perempuan dan ketahanan keluarga (bpkk) membuat program dengan segmen perempuan, begitu juga dengan bidang-bidang yang lainnya. Terkait kriteria atau syarat untuk menjadi anggota partai politik, yaitu:<sup>1</sup>

1. Sudah 17 Tahun/Menikah
2. WNI
3. Kemauan sendiri untuk bergabung

---

<sup>1</sup> Sri Rezeki, Ketua Bidang Kaderisasi Kota Medan. Wawancara via whatsapp, Medan, 11 Februari 2022.

Berdasarkan KTA per Februari 2022 perbandingan jumlah anggota laki-laki dan perempuan PKS Kota Medan sebanyak 2.889 : 3.337. Namun bila dibandingkan pada tahun 2020 secara keanggotaan telah mengalami peningkatan. Adapun pada tahun 2020 anggota laki-laki sebanyak 1.946 sedangkan perempuan sebanyak 1.315 orang.

Setelah berkontribusi pada partai, perempuan butuh diberdayakan untuk meningkatkan kualitas mereka. Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada kader perempuan dalam politik dan mampu bersaing dengan laki-laki. Pembekalan membuat kader perempuan memiliki daya saing sehingga diharapkan mampu menduduki jabatan strategis di dalam partai atau bahkan memenuhi syarat sebagai anggota legislatif untuk mewakili partai.

Ketika perempuan telah diberdayakan dan kemudian menjadi kader aktif, kemudian mereka memasuki fase pengorganisasian dimana perempuan sudah siap bersaing dengan laki-laki. Kader perempuan PKS bisa bersaing dengan kader laki-laki untuk menduduki posisi strategis di internal partai dengan pertimbangan pengalaman dan kemampuan kader. Kader perempuan juga bisa bersaing dengan kader laki-laki untuk menjadi anggota legislatif mewakili partainya. Pada pileg 2019 di Kota Medan, perempuan dari setiap dapil I-V telah mencapai rata-rata 30 %. Perempuan kebanyakan ditempatkan pada nomor urut 3 atau kelipatannya. Namun ada satu nama yang dibuat pada urutan nomor 1 yaitu bu Dhiayul Hayati pada Dapil V sehingga tidak heran bila beliau pada saat ini satu-satunya caleg PKS Tahun 2019 yang berhasil duduk di DPRD Kota Medan. Dikarenakan ada anggapan bahwa calon di nomor urut pertama memiliki peluang lebih besar untuk lolos karena masyarakat yang tidak berpikir panjang memiliki kecenderungan untuk langsung memilih calon nomor urut satu tanpa melihat calon nomor urut berikutnya.

Dalam kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan ada sebuah bidang yang khusus untuk perempuan yaitu BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga). Bidang ini

terfokus pada dua hal yakni perempuan dan ketahanan keluarga. Ibu Doni Hardiani Siregar berkata bahwa bidang ini penting dibuat berdasarkan sebuah ungkapan atau kata-kata ulama namun bukan merupakan hadits yakni<sup>2</sup>

الْمَرْأَةُ عِمَادُ الْبِلَادِ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتِ الْبِلَادُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتِ الْبِلَادُ

“Wanita adalah tiang negara, jika baik wanitanya maka baiklah negaranya dan jika rusak wanitanya maka rusak pulalah negaranya.”

Jadi perempuan adalah basis penting dari bergeraknya sebuah negara. Sementara keluarga juga merupakan strategi penting dalam perpolitikan di Indonesia. Basis membangun karakter manusia adalah dalam keluarga. Sebagaimana dilihat di Indonesia telah terjadi krisis keluarga ditandai dengan meningkatnya angka perceraian. Untuk itu perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga maupun negara.<sup>3</sup>

Dalam kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan memang masih rendah, namun pada perwakilannya di DPRD Kota Medan meningkat dari tahun sebelumnya. Sebagaimana dikatakan ibu Doni selaku ketua BPKK bahwasanya peningkatan suara perempuan di DPRD Kota Medan tersebut karena memiliki strategi yang berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan pada pemilu selanjutnya juga memiliki strategi yang berbeda pula.<sup>4</sup> Adapun perbedaannya terletak pada sasarannya yang lebih kepada internal dan sekarang lebih eksternal.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Doni Hardiani Siregar, Ketua BPKK PKS Kota Medan, wawancara pribadi, Medan, 09 Februari 2022.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Sri Rezeki, *Ibid.*

Dalam hal ini, BPKK berpartisipasi dengan membuat berbagai program bagi masyarakat khususnya perempuan, diantaranya:

1. Rumah Keluarga Indonesia Peduli (RKI Peduli)

Rumah Keluarga Indonesia adalah program yang dicanangkan Partai Keadilan Sejahtera melalui Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) dari pusat sampai daerah dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

Keluarga merupakan pondasi penting dalam kemajuan suatu negara. Kekuatan sebuah keluarga akan berdampak positif bagi tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, PKS menaruh perhatian besar pada masalah ketahanan keluarga. Keseriusan PKS terhadap isu ketahanan keluarga dan tumbuh kembang anak diwujudkan melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang dapat menjadi acuan dan wadah bagi keluarga Indonesia dalam mendidik dan menjaga kerukunan keluarga. PKS juga mengimbau kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan ketahanan keluarga. Sebab, diperlukan kerjasama yang serius dari semua elemen, terutama pemerintah sebagai pengambil kebijakan.

Di Kota Medan sendiri, Rumah Keluarga Indonesia (RKI) sebagai program Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Kota Medan pada awalnya akan diresmikan pada bulan Mei 2021, namun karena masih suasana pandemi covid-19 diundur dan pada akhirnya bulan September 2021 baru diresmikan.

2. Sekolah Ibu dan Sekolah Pra Nikah

Tingginya angka perceraian dan kenakalan remaja khususnya di kota-kota besar seperti Medan perlu mendapat perhatian serius. Untuk menjawab tantangan fenomena tersebut, Bidang Ketahanan Perempuan dan Keluarga dari Partai Keadilan Sejahtera (BPKK PKS) Kota Medan

sebagai partai dakwah mengambil peran dengan menggelar Lounching Sekolah Ibu dan Sekolah Pranikah pada bulan September 2021 di Jl. Sei Beras, Babura Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.

Menurut pandangan Ketua BPKK PKS Kota Medan, salah satu hal penting untuk menekan angka tersebut adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif kepada ibu dan pasangan yang usianya sudah siap menikah di masa pranikah agar mendapatkan solusi bagaimana menjalankan hubungan rumah tangga dan mendidik anak dengan baik.

Berkaitan dengan itu, selain membantu pemerintah dalam upaya menekan tingginya angka perceraian dan kenakalan remaja, PKS Kota Medan juga hadir dengan program pemberdayaan perempuan yaitu Sekolah Ibu dan Sekolah Pra Nikah. Program sekolah ibu dan program sekolah pranikah akan berjalan selama 6 bulan untuk setiap generasi. BPKK PKS Kota Medan telah membuka pendaftaran bagi ibu-ibu dan usia pranikah untuk belajar bersama dengan mendatangkan ahli psikologi, kesehatan dan keluarga serta bidang ilmu yang dianggap perlu.

Ketua BPKK DPD PKS Kota Medan, Ibu Doni Hardiani Siregar menjelaskan bahwa program ini merupakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya berpartisipasi dalam program merajut keluarga Samawa (Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah).

Diharapkan setelah menempuh pendidikan di Sekolah Ibu dan Sekolah Pranikah, alumni dari sekolah-sekolah tersebut dapat menjalankan bahtera rumah tangganya dengan lebih terpola dan teratur. Sehingga melahirkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, sehingga para alumni tersebut dapat menjadi panutan di masyarakat sekitar dan menularkan ilmu yang didapat kepada masyarakat sekitar, dan akhirnya semakin banyak keluarga yang menjalankan dengan pola yang benar akan meminimalisir permasalahan yang terjadi di rumah tangga dan masyarakat.

### 3. Sekolah Cinta Indonesia

Di DPD PKS Kota Medan sendiri, Sekolah Cinta Indonesia (SCI) diresmikan bersamaan sekolah ibu dan sekolah pra nikah. Sekolah Cinta Indonesia adalah salah satu bukti cinta PKS terhadap Indonesia. Keberadaan SCI ini merupakan bukti bahwa PKS mencintai Indonesia. Hal ini sesuai dengan landasan pembangunan PKS yang berangkat dari visi menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

Berkenaan dengan partisipasi perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam berpolitik, Ibu Dhiayul Hayati mengungkapkan bahwa partisipasinya dalam Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan adalah sejak tahun 1999. Keberhasilannya menjadi anggota DPRD Kota Medan tidak terlepas dari adanya peluang yakni banyaknya jaringan di masyarakat. Selain peluang, ada juga tantangan berupa adanya kompetitor dari partai lain.<sup>6</sup>

#### **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam Berpolitik**

Minimnya keterwakilan perempuan pada kepengurusan PKS Kota Medan merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Dengan jumlah perempuan yang disebutkan sebelumnya tidak kalah dengan jumlah laki-laki, bahkan jumlah perempuan melebihi laki-laki sehingga bukan suatu kemustahilan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik akan mencapai 30 %.

---

<sup>6</sup> Dhiayul Hayati, Caleg PKS Tahun 2019/Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Medan Tahun 2019-2024, Wawancara Pribadi, Medan, 11 Maret 2022.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor pendukung dan penghambat partisipasi perempuan PKS, diantaranya:<sup>7</sup>

1. Faktor Pendukung

- a. Sistem Kuota

Adanya sistem kuota perempuan oleh pemerintah melalui sejumlah peraturan perundang-undangan salah satunya UU Nomor 2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Patai politik diharapkan mampu mendongkrak keterwakilan perempuan khususnya pada kepengurusan partai politik. Karena dengan ditetapkannya ketentuan minimal 30 % keterwakilan perempuan bagi kepengurusan partai adalah salah satu upaya positif pemerintah untuk memberdayakan perempuan dalam dunia perpolitikan.

- b. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang lainnya. Perempuan sebagai seorang istri tentunya memiliki kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Untuk itulah diperlukan adanya dukungan penuh dari keluarga terhadap perempuan yang hendak berpartisipasi dalam partai politik. Dukungan keluarga adalah yang paling utama. Menurut Ibu Dhiayul Hayati, keberhasilannya menjadi anggota DPRD Kota Medan tidak terlepas dari dukungan keluarga besar. Saat seorang perempuan yang hendak berpolitik mendapat dukungan dari orang tua. Orang tua memberikan doa dan dukungan total bagi anak perempuannya. Begitu juga ketika menjadi seorang istri, harus mendapat izin dari sang suami. Seseorang mampu

---

<sup>7</sup> Doni Hardiani Siregar, *Ibid.*

mengurus masyarakat ketika sudah mampu mengurus keluarga. Intinya, keluarga ibarat sebuah *support system* yang berperan besar membantu ketika seseorang perempuan hendak berpolitik.<sup>8</sup>

c. Finansial

Berbicara finansial berarti berbicara tentang keuangan. Tentu saja tidak bisa dielakkan bahwa biaya politik tidaklah gratis. Jadi dukungan finansial pun sangat berpengaruh untuk seseorang berpartisipasi dalam partai politik terlebih jika berpartisipasi dalam pemilihan legislatif. Seperti dituturkan bu Dhiayul Hayati bahwa finansial harus disediakan juga.<sup>9</sup>

d. Skill

Skill merupakan kemampuan atau kompetensi seseorang. Tentunya untuk berpartisipasi dalam partai politik harus memiliki *public speaking* yang baik. Seorang perempuan jangan hanya sebagai pemanis saja, namun harus ikut andil dalam memahami kinerja dalam partai politik. Selain itu, menurut Bu Dhiayul Hayati diperlukan kemampuan memobilisasi massa. Mobilisasi massa adalah merekrut orang sebanyak-banyaknya. Sebagai kader partai harus mampu memobilisasi massa untuk mendukung partai.<sup>10</sup>

2. Faktor Penghambat

Menurut PKS, secara Islam partisipasi perempuan dalam partai politik tidak ada hambatan sama sekali. Sebagai partai dakwah memahami bahwa Islam memberikan porsi yang besar bagi perempuan dalam bernegara termasuk dalam partai politik.

---

<sup>8</sup> Dhiayul Hayati, *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*



a. Keluarga

Perempuan sebagai seorang ibu dalam sebuah keluarga tentu memiliki kewajiban pada anak-anaknya apalagi masih kecil. Sementara jika berpartisipasi dalam partai politik seseorang harus siap ketika ada waktu mendesak atau mendadak. Ibu Doni Hardiani Siregar menyebutkan yang biasanya dipilih untuk menjadi caleg partai PKS adalah keluarganya yang sudah siap mendukung. Dalam arti lain anak-anaknya sudah besar dan juga didukung atau mendapat izin dari suami.<sup>11</sup>

b. Finansial

Di era sekarang, sudah menjadi kebiasaan untuk mendapat simpati masyarakat atau bahkan meraup suara masyarakat dalam pemilu tidak diperdulikan sama sekali jika tidak ada buah tangan yang diberikan. Oleh karena itu, minimnya dana akan menghambat partisipasi perempuan.

c. Sistem Perekrutan PKS

Ibu Doni Hardiani Siregar mengatakan PKS mungkin tidak seperti partai lainnya, dalam partai PKS seorang anggota yang dianggap mampu untuk maju dalam pemilihan umum itulah yang ditunjuk oleh partai. Jadi untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, baik perempuan maupun laki-laki tidak bisa mengajukan diri namun harus ditunjuk oleh partai.<sup>12</sup>

d. Budaya Patriarki

Budaya patriarki masih melekat secara umum dalam kehidupan sosial, hal ini menunjukkan bahwa laki-laki masih berada di atas, sehingga kedudukan perempuan dalam masyarakat masih belum terlihat melebihi laki-laki dan laki-laki juga selalu diposisikan paling penting, unggul dan

---

<sup>11</sup> Doni Hardiani Siregar, *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

dominan dalam masyarakat. Berbagai diskusi tentang budaya patriarki, lebih memposisikan pria sebagai yang paling utama apalagi jika dibandingkan dengan perempuan. Inilah yang membuat wanita merasa kurang didukung dan didiskriminasi dalam bidang politik. Seperti dikatakan Ibu Doni Hardiani Siregar bahwa di Kota Medan masih kentalnya budaya patriarki ini. Tantangan kultural inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat partisipasi perempuan dalam partai politik juga dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan.<sup>13</sup>

### **C. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Partisipasi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan dalam Berpolitik**

Jika kita kembali melihat bagaimana model penentuan kepemimpinan baik pada masa Nabi Muhammad SAW, maupun Khulafaur Rasyidin tidak pernah memiliki istilah partai baik secara konsep atau praktek. Pada masa itu, penentuan Imamah (Kepemimpinan) hanya ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atau dipilih dan disumpah oleh sekelompok sahabat yang dikenal sebagai lembaga *Ahl Al Halli wa Al'Aqdi*, setelah itu orang-orang berbondong-bondong mengikrarkan bai'at kepadanya. Sedangkan dalam menentukan perangkat pemimpin bawahannya seperti gubernur diangkat langsung oleh kepala negara sendiri, sebagaimana praktek di zaman Nabi dan keempat sahabat.

Sebagian ulama dan ahli fiqh siyasah berasumsi perpecahan ummat Islam pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang berperang dengan Mu'awiyah pada perang Shiffin sebagai penyebab terbentuknya partai politik dalam Islam. Mereka menganggap kehadiran aliran Khawarij, Syi'ah, dan Mu'tazilah, pasca perang Shiffin yang kemudian muncul juga Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, Murji'ah, dan sebagainya sebagai penyebab utama munculnya partai politik dalam

---

<sup>13</sup> Doni Hardiani Siregar, *Ibid.*

Islam. Tetapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah bahwa pada waktu itu tidak ada satu golongan pun dari mereka yang menyebut kelompoknya sebagai partai politik. Mereka menamakan kelompoknya sebagai sekte independen dan tidak mau mengikuti sekte lain karena berpikir sekteanya lebih baik. Sehingga perpecahan ummat yang membentuk firqah-firqah saat itu lebih banyak mengarah pada praktik ajaran agama, bukan pada sistem politik. Mereka juga tidak berkampanye untuk menentukan kepala negara yang sesuai untuk partai politik saat ini.<sup>14</sup>

Ketika berbicara tentang politik, tentu harus berbicara tentang aktor politiknya. Yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai aktor politik. Sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana politik, perempuan tidak memiliki tempat yang berarti, bahkan terpinggirkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya mengenai lembaga pemerintah, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan aktivitas perempuan.<sup>15</sup>

Faktanya, memang perempuan berbeda dengan laki-laki, terutama dalam struktur anatominya. Dalam tubuh perempuan terdapat alat reproduksi yang membuatnya hamil dan melahirkan anak hingga akhirnya menjadi seorang ibu. Namun, meskipun demikian perempuan merupakan madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang baik manakala berpedoman dengan Al Quran dan sunnah.<sup>16</sup> Allah berfirman

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة/2: 228)

---

<sup>14</sup> Hasanuddin Yusuf Adan. "Partai Politik Dalam Perspektif Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 3,1, (2014): hlm. 490.

<sup>15</sup> Besse Agus Susanti, "Aspek Perlindungan Hukum Perempuan Berpolitik di Indonesia dan Fiqh Siyasa (Analisis Perbandingan)," (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 61.

<sup>16</sup> Abdul Syukur al Azizi, *Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita*, (Depok: Noktah, 2017), hlm. 15.

Artinya: "...Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf..."

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة/9: 71)

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Dalam islam dikenal prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf nahi munkar* merupakan sebuah pilar penting dalam agama dalam mewujudkan misi kenabian. Tanpanya misi kenabian tidak akan tercapai, namun semakin menyebarkan kesesatan dan kebodohan dan membudayanya kezhaliman dan kerusakan.<sup>17</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum.<sup>18</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai perempuan berkontribusi di ranah publik termasuk dalam berpolitik. Ada yang berpendapat bahwa pemilihan umum sebagai jalan bagi kaum perempuan untuk menduduki jabatan publik adalah suatu hal yang diharamkan dalam syariat. Jika seorang perempuan diberikan hak memilih, maka secara otomatis berhak untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif selama memenuhi syarat. Pendapat ini merujuk pada kaidah berikut ini:

---

<sup>17</sup> Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara*, (Yogyakarta: Ircisod, 2017), hlm. 109.

<sup>18</sup> Liky Faizal, "Perempuan dalam Partai Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12,1 (2016): hlm. 99.

إِذَا حُرِّمَ شَيْءٌ فَالطَّرِيقَ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى فِعْلِهِ مُحَرَّمٌ أَيْضًا

“Apabila diharamkan sesuatu, maka jalan menuju kepadanya juga hukumnya haram.”

Kaidah diatas termasuk tujuan dan semua jalan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>19</sup> Pendapat tersebut juga didukung oleh hadits Nabi:

مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ أَسْتَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى النِّسَاءِ

“Tidaklah bahagia suatu kaum yang menyerahkan persoalannya kepada wanita.” (HR. Al Bukhari, At Tirmidzi, An Nasai, dan Ahmad)<sup>20</sup>

Disamping itu, seiring berkembangnya zaman dalam konteks kekinian, para fuqaha kontemporer bahkan membolehkan perempuan berpolitik. Salah satunya Al Buthi yang berpendapat bahwa perempuan dapat menempati posisi dan tugas politik selain pimpinan dan diperbolehkan terlibat didalamnya. Hak yang telah dimiliki perempuan tersebut harus disertai dengan profesionalitas dalam melaksanakan kewajiban sesuai ajaran Islam, kaidah moral, dan kebiasaan setempat.<sup>21</sup> Sebagaimana hadits ahad di atas yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kepemimpinan perempuan dan menyandarkan segala urusan kepadanya. Urusan yang dimaksud adalah kepentingan umum. Maka perempuan dilarang memegang seluruh kontrol kekuasaan negara secara total. namun bila menguasai sebagian urusan dengan adanya partisipasi orang lain, maka hal tersebut sesuai dengan prinsip syura dan demokrasi. Jikademikian halnya,

---

<sup>19</sup> Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fikih Kontemporer* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 128.

<sup>20</sup> Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 46.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

maka tidak ada kekhawatiran dan bahaya jika perempuan berkuasa terhadap kepentingan umum dan partisipasinya dalam seluruh hak politik selama ada keterlibatan orang lain.<sup>22</sup>

Perempuan selain sebagai hamba Allah, ibu dari anak-anaknya, istri dari seorang suami, serta anak-anak dari orang tuanya, adalah bagian dari masyarakat serta laki-laki. Keberadaan keduanya di tengah masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh, karena keduanya bertanggung jawab untuk membawa umat Islam menjadi ummat terbaik di dunia ini. Inilah salah satu kegiatan politik yang harus dilakukan baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama dan berkesinambungan.

Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam Islam yaitu persamaan antar sesama manusia. Islam tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan warna kulit, suku bangsa, dan sebagainya namun sesuai ketakwaannya kepada Allah swt. Karena itu tidak ada seorangpun yang berhak memperoleh perlakuan yang khusus didepan hukum.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, partisipasi perempuan PKS Kota Medan sebagaimana telah disebutkan diatas adalah bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah program yang dicanangkan BPKK PKS Kota Medan. Program-program yang dibuat lebih mengarah kepada perempuan dan ketahanan keluarga. Melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI), PKS berupaya meningkatkan ketahanan keluarga yang pada akhirnya membawa dampak positif bagi anak sebagai generasi penerus bangsa. Untuk mengurangi angka perceraian dimana kita ketahui sendiri bahwa itu merupakan suatu hal yang dibenci Allah, maka PKS melalui sekolah ibu berupaya memberikan pendidikan bagi ibu-ibu untuk menerapkan pola kehidupan rumah tangga

---

<sup>22</sup> Nihayatul Masykuroh, *Wanita dan Politik* (Banten: Media Karya Kreatif, 2020), hlm. 113-115.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Ibid.*, hlm. 238.

yang lebih teratur. Melalui sekolah pranikah, PKS berupaya mengurangi tingkat kenakalan remaja yang sudah semakin kebablasan di era sekarang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN